



Buletin **Bappebti**

Mengabdikan Dengan Integritas

**Tekad Tanggamus
Pada SRG**

**Apa Rencana Besar
Bappebti?**

JFX Menggadang IGBF

Inflansi

SRG

**Jabar Kendalikan
Inflasi Dengan SRG**



Berita Utama.....4-7

- Jabar Kendalikan Inflasi Dengan SRG
- Percepatan Implementasi SRG

Berjangka.....8-9

- Apa Rencana Besar Bappebti?

Resi Gudang.....10-11

- Tekad Tanggamus Pada SRG

Pasar Lelang.....12-13

- Gairah Pasar Lelang Jateng

Agenda Foto.....14-15

Aktualita.....16-17

- JFX Bekukan 2 Izin Pialang
- Arah Kebijakan Bappebti 2015
- JFX Menggadang IGBF
- Permendag No. 33 Ciptakan Good Mining Practices

Analisa.....18

Breaking News.....19

Info.....20

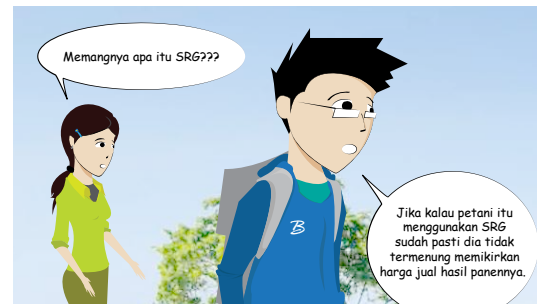
Info PLKA.....21

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

KomiKita...22-24

Sistem Resi Gudang
Memperkuat Posisi Tawar
Petani



Kolom...24-25

Hedging BBM Untuk Stabilitas
Harga Nasional



Kiprah...26-27

Ernawan Sukardi
Step by Step



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab
Sutiriono Edi

Pemimpin Redaksi
Sri Nastiti Budianti

Wakil Pemimpin Redaksi
Taufik K.S

Dewan Redaksi
Subagiyo, Saleh Abich, Himawan
Purwadi, Yuli Edi Subagio, Annisa F.
Wulandari, Poppy Juliyanti, Yovian Andri
P., Tomi Setiawan

Sirkulasi
Apriliyanto, Katimin, Gita Regina
Napitupulu

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti, menyampaikan arahan dalam pelatihan teknis calon Pengelola Gudang SRG.

Program kedaulatan pangan nasional yang diinstruksikan pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Karena itu, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, mencanangkan percepatan implementasi Sistem Resi Gudang-SRG diberbagai daerah. Sebab, instrumen SRG dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas pangan nasional, terutama bahan pokok pangan.

Gerakan pencanangan percepatan implementasi SRG itu diutarakan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, disela-sela kunjungan kerja di Gudang SRG, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Rachmat Gobel, SRG dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi.

Melalui IS-WARE, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG sehingga dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan distribusi dan penyediaan bahan pangan di daerah-daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

"SRG juga berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Gudang-gudang SRG tersebut dapat menjadi infrastruktur penting dalam pengoperasian supply chain- mata rantai

pasok untuk penciptaan program pengadaan dan penyaluran logistik secara nasional," imbuhnya.

Mengingat banyaknya manfaat SRG, Rachmat Gobel, mengajak seluruh stakeholders SRG agar melaksanakan dan memanfaatkan SRG, sehingga implementasi SRG dapat terlaksana lebih cepat dan lebih luas serta sekaligus dapat meningkatkan kualitas, menyediakan akses pembiayaan, dan peningkatan daya saing, serta kedepannya dapat mendorong kinerja ekspor.

Di bagian lain sorotan Redaksi pada edisi ini yakni, keluarnya lima paket kebijakan Peraturan Kepala Bappebti. Kepala Bappebti, Sutiriono Edi, mengatakan, Kemendag ingin menciptakan integritas perdagangan berjangka komoditi. Dan, paket kebijakan itu merupakan salah satu terobosan penting untuk membangun integritas industri perdagangan berjangka komoditi.

Di sisi lain ditegaskan Sutiriono Edi, penerbitan paket kebijakan ini merupakan strategi jalur ganda- double-track strategy dalam rangka meningkatkan integritas industri PBK. Strategi pertama, Bappebti terus berupaya menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha di bidang PBK di Indonesia.

Strategi kedua, mendorong pertumbuhan iklim usaha yang kondusif di bidang PBK. Guna meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan perizinan secara profesional, pada tahun 2015, 10 perizinan akan dapat diajukan secara online di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II yang berlokasi di Gedung Bappebti.

Salam!!!



Jabar Kendalikan Inflasi Dengan SRG

SRG merupakan salah satu instrumen yang mewujudkan stabilitas harga komoditas, karena itu SRG mampu mengendalikan inflasi di daerah. Bank Indonesia dan PT Pos Indonesia bersinergi kendalikan inflasi melalui implementasikan SRG di Provinsi Jabar.

Sistem Resi Gudang- SRG pada dasarnya merupakan instrumen tunda jual. Artinya, komoditas dapat disimpan lebih dahulu di Gudang SRG pada saat panen raya yang biasanya harga cenderung mengalami penurunan. Dan selanjutnya dijual ketika harga tinggi. Skema tersebut tentunya akan membuat petani mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Selain itu, petani juga bisa mendapatkan akses kredit secara tepat dengan bunga rendah. Petani dapat memperoleh kredit di bank hanya dengan menggunakan jaminan Resi Gudang (RG) sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Tidak diperlukan lagi jaminan atau fixed-asset lainnya seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan sejenisnya.

Hebatnya lagi, SRG dalam implementasinya telah mengalami perkembangan. SRG sudah mulai diapresiasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah- TPID menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok

daerah dan nasional. Lantaran itu, SRG dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Sebab, pengaruh harga komoditas pangan sebesar 60 persen terhadap tingkat inflasi. Untuk itu, pengembangan SRG diberbagai daerah diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan sehingga tingkat inflasi bisa tetap terjaga.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti, Kementerian Perdagangan, Sutiriono Edi, dalam penjelasannya mengatakan, terealisasinya SRG yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, diharapkan stok komoditas bisa lebih terjamin dan harga-harga bisa menjadi lebih stabil. "Dengan demikian pada akhirnya inflasi bisa lebih terkendali," kata Sutiriono Edi, usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Pengembangan dan Percepatan Implementasi SRG di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 21 Mei 2015 lalu.

Sutiriono juga menjelaskan,

Kerjasama ini dilakukan karena manfaat SRG begitu besar dan mempermudah alternatif pembiayaan, khususnya bagi para petani padi.

pentingnya integrasi SRG dengan Sistem Logistik Nasional. Dia melihat, PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan logistik luas memiliki peran dalam percepatan implementasi SRG. "Jika SRG dan jaringan logistik ini sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita mampu mendukung terwujudnya pengendalian inflasi di daerah."

Sebagai informasi, Bappebti yang diwakili Sutiriono Edi, telah melakukan MoU dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Poernomo dan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi- FKPI Jawa Barat dalam hal ini diwakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Rosmaya Hadi, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Ferry Sofwan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan petani, koperasi dan Usaha Kecil Menengah- UKM, serta menstabilkan harga komoditas melalui percepatan implementasi SRG di Jawa Barat.

Adapun MoU tersebut meliputi kerjasama untuk mewujudkan implementasi SRG secara lebih luas, cepat dan sinergis serta terintegrasi dari hulu sampai hilir. Termasuk di dalamnya pemasarannya dengan memanfaatkan potensi seluruh pihak yang terlibat. Kerjasama juga menyangkut

pertukaran data dan informasi terkait SRG (pasokan dan harga), sosialisasi dan edukasi SRG, optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, dibangun dan atau dikelola dalam pelaksanaan SRG, serta mendukung perkembangan Pasar Lelang Komoditas, baik *offline*- open outcry maupun online dan integrasinya.

Penguatan kelembagaan SRG termasuk pemetaan seluruh kondisi yang terkait Sumber Daya Manusia- SDM, infrastruktur, jaringan logistik, operasional, sumber pembiayaan, pemasaran, peran stakeholder, dan model bisnis juga dimasukkan dalam kesepakatan. Penelitian dan pengembangan menjadi satu kesatuan isi nota kerjasama.

Kepala Perwakilan BI, Provinsi Jawa Barat, Rosmaya Hadi, menambahkan, "Kerjasama ini dilakukan karena manfaat SRG begitu besar dan mempermudah alternatif pembiayaan, khususnya bagi para petani padi."

Di sisi lain dikatakan Rosmaya Hadi, model kerjasama antar instansi tersebut merupakan model yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. "Dengan kerjasama tersebut, PT Pos yang memiliki jaringan luas terutama dalam hal distribusi dan bisa melakukan perdagangan online, akan menghubungkan pembeli dari berbagai daerah. Sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jabar, memberdayakan dan menyosialisasikan SRG kepada para petani."

Alternatif Pembiayaan

Bicara persoalan pertanian di Jabar, memang permasalahan yang dihadapi petani cukup banyak. Mulai dari alih fungsi lahan pertanian, penguasaan stok bahan pangan oleh pedagang, dan panjangnya rantai distribusi, hingga terkendalanya upaya perluasan akses petani terhadap pembiayaan.

Masalah ini ternyata juga menjadi tren isu nasional. Dan, Sutiriono Edi optimis SRG mampu menjawab berbagai masalah itu.

"SRG menjawab permasalahan tersebut melalui peranannya sebagai instrumen yang penting dan efektif sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan yang dapat memberdayakan petani serta mengefisienkan rantai tata niaga komoditas," ujarnya.

Dengan SRG, petani memiliki alternatif pembiayaan untuk aktivitas pertaniannya dari resi yang diterimanya ketika menyimpan komoditas di gudang. Terutama pada saat panen umumnya harga sedang berada pada titik terendah.

Bagi pedagang, ketersediaan stok dan pembiayaan dapat memberikan solusi permodalan yang lebih efisien. Sedangkan bagi fungsi pengawasan pemerintah pusat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, SRG menyediakan data jumlah stok komoditas di dalam gudang yang akan mempermudah pemerintah melakukan pemantauan data produksi daerah secara lebih akurat. Pada saat yang sama, akurasi data ini dapat mengurangi spekulasi masyarakat terhadap kurangnya stok yang ada di pasar.

"Integrasi informasi antara satu gudang dengan gudang lainnya akan melahirkan sebuah sistem integrasi data mengenai stok komoditas dari berbagai daerah yang akan mendorong kerja sama antargudang di berbagai daerah dalam menutupi kekurangan stok atas komoditas tertentu," imbuh Sutiriono.

Untuk diketahui, sejauh ini ada sepuluh komoditi yang dapat diresgudangkan. Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan No.08/M-DAG/PER/02/2013, tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG, komoditi tersebut diantaranya komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam.

Sementara itu, Gudang SRG yang telah dibangun pemerintah melalui Bappebti di Provinsi Jabar terdapat sebanyak 12 gudang yang tersebar di Kabupaten Indramayu, Cianjur, Garut, Bogor, Sumedang, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta, Ciamis dan Tasikmalaya.



SRG dapat berperan mewujudkan stabilitas harga komoditas. Sehingga intervensi pemerintah dalam pengendalian harga komoditas strategis, khususnya pangan dapat mulai dikurangi.

Percepatan Implementasi SRG

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 telah bekerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah dalam membangun gudang dengan skema Sistem Resi Gudang-SRG sebanyak 117 unit yang tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia. Adapun yang telah mendapat persetujuan sebagai gudang SRG berjumlah 92 gudang. Dari sekian banyak gudang-gudang SRG tersebut, faktanya hanya beberapa kabupaten yang mampu mengoptimalkan Gudang SRG sesuai harapan.

Melihat gejala tersebut, di awal tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengambil langkah tegas dengan program "Pencanangan Percepatan Implementasi SRG". Program tersebut digelar dalam sebuah acara yang berlangsung di Gudang SRG, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pencanangan percepatan implementasi SRG itu, merupakan salah satu komitmen Kementerian Perdagangan untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Sebab, Rachmat Gobel, bilang, SRG berperan penting dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas pangan nasional, terutama bahan pokok pangan.

"Kemendag mengelola berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting lainnya. Salah satu instrumen yang berperan penting mewujudkan stabilisasi harga adalah Sistem Resi Gudang," tegas Rachmat Gobel.

Dia juga bilang, SRG dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan

stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi.

Melalui IS-WARE, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG sehingga dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan penyebaran (distribusi) dan penyediaan bahan pangan (impor) di daerah-daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

"Dengan adanya keterpantauan stok nasional oleh pemerintah, serta mekanisme tunda jual dan pembiayaan yang dilakukan oleh petani, maka SRG dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas," jelasnya.

Menurut Rachmat, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga komoditas strategis, khususnya pangan dapat mulai dikurangi. Hal ini dapat dilakukan karena petani yang selama ini



Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menyerahkan bantuan truk untuk angkutan komoditi SRG kepada Bupati Subang. Selanjutnya mengunjungi gudang SRG Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat.



tidak memiliki posisi tawar akan mampu menentukan jumlah pasokan komoditas di pasar, sehingga harga komoditas juga dapat mereka kendalikan sendiri.

Selain itu, ketidak-akuratan informasi ketersediaan pasokan dalam negeri juga dapat dihindari, sehingga kebijakan impor yang akan dilakukan pemerintah menjadi lebih tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.

"SRG juga berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Gudang-gudang SRG tersebut dapat menjadi infrastruktur penting dalam pengoperasian *supply chain*-mata rantai pasok untuk penciptaan program pengadaan dan penyaluran logistik secara nasional," imbuhnya.

Mengingat banyaknya manfaat SRG, Rachmat Gobel berharap sinergi pemerintah daerah, baik itu bupati, kepala dinas perdagangan, pelaku usaha, petani, koperasi, kelompok tani, pabrik, perbankan, badan penyuluh pertanian, pengelola gudang dan asuransi agar dapat mempercepat implementasi pelaksanaan SRG.

"Saya mengajak para pihak *stakeholders* yang akan melaksanakan dan memanfaatkan SRG agar bersatu padu meningkatkan kerjasama dan saling bersinergi, sehingga implementasi SRG

dapat terlaksana lebih cepat dan lebih luas serta sekaligus dapat meningkatkan kualitas, menyediakan akses pembiayaan, dan daya saing, serta ke depannya dapat mendorong ekspor," pesan Rachmat.

Rachmat juga mengatakan, Kementerian Perdagangan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perluasan pelaksanaan SRG seperti pembentukan kelompok kerja, sosialisasi, MoU dengan kementerian-lembaga terkait, pembangunan gudang-gudang SRG, serta subsidi Bunga Resi Gudang (S-SRG) dimana petani hanya dikenakan bunga 6 persen per tahun.

KSU Annisa

Terpilihnya Kabupaten Subang sebagai tempat pencanangan percepatan implementasi SRG bukannya tanpa alasan. Gudang SRG untuk komoditi beras ketan di Kabupaten Subang yang dikelola Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa dinilai telah mampu mengembangkan SRG. Tak heran, implementasi SRG di Kabupaten Subang telah diakui menjadi role model (percontohan) suksesnya implementasi SRG di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan memberikan 1 Rice Milling Unit dan 1 buah truk untuk gudang SRG milik Pemerintah

di Kabupaten Subang ini. Pemberian sarana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas, efisiensi, dan nilai tambah dalam pemanfaatan SRG. Tak hanya itu, KSU Annisa juga mendapatkan penghargaan dari Mendag Rachmat sebagai koperasi yang telah berhasil dan mampu menjalankan program SRG bagi para petani lokal Subang.

"Saya juga mengharapkan kabupaten lainnya dapat mengikuti Kabupaten Subang untuk segera mengimplementasikan SRG, baik pada gudang pemerintah maupun swasta dan BUMN seperti Bulog, sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat luas," harap Rachmat.

Sementara itu, Ketua KSU Annisa Hety Yoheti mengungkapkan, penghargaan itu akan menjadi motivasi KSU Annisa dalam mengembangkan dan menjalankan program SRG bagi para petani di wilayah Subang. "Kami juga mohon kepada Pemda Subang untuk terus mendukung keberadaan KSU Annisa ini. Dengan begitu, segala apa yang kami butuhkan akan dapat terbantu dalam menjalankan SRG," katanya.



Bappebti garap rencana besar untuk menyusun strategi agar Indonesia dapat membentuk price discovery dan menjadi referensi harga komoditi dunia.

Apa Rencana Besar Bappebti?

Sebagai negara penghasil komoditi ekspor utama dunia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti, Kementerian Perdagangan, meyakini dapat membentuk harga- *price discovery* dan menjadi referensi harga komoditi dunia. Terkait itu, Bappebti sedang menggarap rencana besar untuk menyusun strategi yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan bursa berjangka.

Kepala Bappebti Sutriono Edi, dalam pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan dan asosiasi komoditi di Indonesia yang mengusung tema 'Pertemuan Teknis Asosiasi Komoditi' di Gedung Kemendag Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan, sebagai negara penghasil komoditi ekspor terbesar dunia seperti karet, kakao, CPO, teh, kopi, emas, tembaga, timah, nikel, dan batu bara, seharusnya kita dapat menciptakan harga komoditi yang menjadi referensi harga komoditi dunia.

"Melalui acara seperti ini, diharapkan banyak masukan dan saran dari perwakilan asosiasi komoditi dalam rangka membentuk referensi harga komoditi dunia dan pengembangan bursa berjangka di Indonesia," kata Sutriono Edi.

Dalam pertemuan tersebut, Sutriono Edi dan Hasan Zein Mahmud, mantan

direksi bursa berjangka didapuk sebagai sebagai pembicara kunci. Masing-masing memaparkan makalah mengenai langkah strategis bursa berjangka Indonesia untuk menjadi penentu harga dunia melalui perdagangan fisik komoditi. Sementara itu, pembahas utama adalah Staf Khusus Bidang Penguatan Perdagangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Guru Besar Univ. Lampung, Bustanul Arifin.

Asosiasi dan pelaku komoditi yang hadir dalam acara itu diantaranya Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (ASPEBTINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO), Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Pedagang Teh Indonesia (ASPEGTINDO), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Eksportir Pala Indonesia (AEPA).

"Kami meyakini cita-cita itu dapat diraih meski selama ini masih mengalami kendala," ujar Sutriono. Menurutnya, ken-

dala yang dihadapi adalah saat ini Indonesia belum menjadi pasar yang menarik bagi investor untuk bertransaksi komoditi ekspor dunia karena belum memiliki *liquidity provider* yang potensial untuk meningkatkan likuiditas pasar komoditi. "Selain itu, pelaku pasar fisik komoditi belum terkonsolidasi dengan baik. Tantangan lainnya adalah belum tersedianya perdagangan fisik komoditi yang terorganisir, wajar, teratur, transparan dan akuntabel."

"Untuk meniasasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat pembentukan harga dan referensi harga komoditi dunia melalui bursa berjangka," tambah Sutriono.

Sebab itu, Sutriono Edi berharap para pelaku dan asosiasi komoditi harus bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko, pembentukan harga komoditi, dan sarana investasi.

"Kita memerlukan strategi yang difokuskan pada pembentukan pasar fisik yang terorganisir, konsolidasi pasar komoditi, penerapan standar mutu komoditi, akses pembiayaan, dan paket regulasi," papar Sutriono Edi.

Para pelaku dan asosiasi komoditi harus bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko, pembentukan harga komoditi, dan sarana investasi.

Paket Kebijakan

Dalam kesempatan itu, Sutriono Edi, juga mengatakan, Bappebti akan merumuskan pengaturan tentang tata niaga komoditi unggulan Indonesia. Dengan pengaturan itu Bappebti akan menerbitkan paket kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Paket kebijakan yang dimaksud adalah berupa lima buah Peraturan Kepala (Perka) Bappebti. Kelima peraturan saling terkait dan mencakup berbagai macam isu tentang perlindungan nasabah, peningkatan integritas industri PBK, dan peningkatan kredibilitas, serta integritas Pialang Berjangka.

"Harus diciptakan dan dikawal integritas Pialang Berjangka terutama dalam pelaporan keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap industri PBK di Indonesia," sebut Sutriono Edi.

Di sisi lain ditegaskan Sutriono Edi, penerbitan paket kebijakan ini merupakan strategi jalur ganda- *double-track strategy* dalam rangka meningkatkan integritas industri PBK. Strategi pertama, Bappebti terus berupaya menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha di bidang PBK di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan

terhadap industri PBK.

Strategi kedua, mendorong pertumbuhan iklim usaha yang kondusif di bidang PBK. Guna meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan perizinan secara profesional, pada tahun 2015, 10 perizinan akan dapat diajukan secara online di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II yang berlokasi di Gedung Bappebti.

Selain itu, Sutriono Edi menjelaskan Perka Bappebti ini dilatarbelakangi tiga hal penting lainnya. Pertama, penertiban pengelolaan dana nasabah pada rekening terpisah. Kedua, penertiban laporan keuangan, laporan modal bersih disesuaikan, modal disetor, termasuk laporan dana nasabah di rekening terpisah agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketiga, penertiban pengelolaan keuangan pada perusahaan pialang berjangka dan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) untuk menjaga integritas keuangan pialang berjangka dan penyelenggara SPA.

Sutriono Edi juga meminta semua pihak yang terlibat dalam PBK di Indonesia agar berperan aktif dalam melakukan transaksi kontrak berjangka komoditi multilateral, sebagai upaya meningkatkan likuiditas bursa berjangka agar dapat mewujudkan industri PBK di Indonesia yang dapat bersaing dengan bursa berjangka internasional.

Upaya peningkatan transaksi multilateral, lanjut Sutriono Edi, juga perlu diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. "Saya lihat pengaduan nasabah masih cukup tinggi, baik yang disampaikan ke Bappebti, bursa berjangka dan lembaga penegak hukum lainnya, maka saya tekankan pentingnya kepatuhan dalam peraturan dan perundang-undangan," paparnya.

Diantaranya paket kebijakan yang diterbitkan Bappebti yakni Peraturan Kepala Bappebti No. 115/BAPPEBTI PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi. Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, mengingat Perka sebelumnya

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.


Selanjutnya, Peraturan Kepala Bappebti No. 116/BAPPEBTI PER/03/2015 Tentang Larangan Memberikan Pinjaman Kepada Pihak Terafiliasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini merespon atas adanya pemanfaatan dana perusahaan oleh pemilik perusahaan ataupun pihak terafiliasi dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak dimaksud yang mengganggu integritas keuangan perusahaan.

Ketiga, Peraturan Kepala Bappebti No. 117/BAPPEBTI PER/03/2015 Tentang Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dana Nasabah perlu diawasi dengan efektif sehingga tidak disalahgunakan oleh Pialang Berjangka. Untuk itu penempatan margin perlu diatur di Lembaga Kliring Berjangka sebesar 70 % sebagai jaminan transaksi.

Keempat, Peraturan Kepala Bappebti No. 119/BAPPEBTI PER/03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka.

Kelima, terkait dengan Perka No. 119, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas pelaporan mengenai Dana Nasabah pada Rekening Terpisah (DNRT) oleh Pialang Berjangka dengan Peraturan Kepala Bappebti No 120/BAPPEBTI PER/03/2015 Tentang Pengelolaan Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka.

Untuk itu, Sutriono Edi meminta semua pelaku usaha bersinergi. "Saya berharap para pelaku usaha untuk bersinergi menjadikan industri PBK di Indonesia agar dapat bersaing dengan Bursa Berjangka Internasional," tuturnya.

"Kemendag ingin menciptakan integritas PBK. Paket kebijakan ini merupakan salah satu terobosan penting untuk membangun integritas tersebut," tegas Sutriono Edi. 



Tekad Tanggamus Pada SRG

Tak mau ketinggalan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus menerbitkan Resi Gudang.

Pemerintah terus hadir memberikan solusi bagi persoalan pangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan operasional Sistem Resi Gudang- SRG. Instrumen SRG merupakan salah satu upaya Kemendag untuk menjaga stok pangan daerah dan nasional. Ketersediaan pangan di daerah akan mendukung upaya stabilisasi harga pangan dalam negeri sekaligus sebagai upaya mencapai ketahanan pangan nasional.

"Optimalisasi SRG merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil menengah," tegas Inspektur Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih, mewakili Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti, saat

menghadiri Pencanangan Operasional SRG di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, 29 Mei 2015 lalu. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi dan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan.

Kemendag hingga 27 Mei 2015 telah menerbitkan 1.943 Resi Gudang dengan total volume komoditas sebanyak 74.517,13 ton. Dengan terbitnya Resi Gudang sebanyak itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas komoditas pertanian yang diperdagangkan. Dari sebanyak 1.943 Resi Gudang tersebut didominasi komoditas gabah sebanyak 63.985,59 ton, disusul beras 5.417,72 ton, jagung 4.670,03 ton, rumput laut 420 ton, dan kopi 77,79 ton.

Sedangkan total nilai Resi Gudang yang telah diterbitkan yakni sebesar Rp

382,13 miliar dengan pembiayaan dari bank dan nonbank mencapai Rp 238,69 miliar. "Dari waktu ke waktu, Resi Gudang terus meningkat. Namun, Kemendag akan terus meningkatkan volume komoditas yang disimpan dalam Gudang SRG. Kemendag optimis SRG mampu menjadi salah satu tolak ukur Pemerintah dalam memperhitungkan stok pangan nasional," tambah Karyanto.

Menurut penjelasan Karyanto, pertumbuhan SRG menunjukkan perkembangan positif. Pada 2014, volume komoditas dalam SRG meningkat 4 % (853 ton) dengan nilai komoditas Rp 7,6 miliar meningkat sebesar 7 % dibandingkan tahun 2013. Sedangkan pembiayaan yang diberikan dari Lembaga Keuangan (bank/nonbank) meningkat sebesar 13 % yakni sebesar Rp 8,8 miliar.

Stabilitas Harga

Kembali ditegaskan Karyanto Suprih, untuk mewujudkan stabilitas harga pangan, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah mengupayakan cara meningkatkan posisi tawar petani, khususnya dalam menentukan nilai dan waktu jual komoditas hasil panennya. Untuk itu, diperlukan keterbukaan terhadap akses pembiayaan dari lembaga pembiayaan baik bank maupun nonbank. Melalui UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, SRG hadir untuk menjawab ancaman tersebut.

"SRG itu merupakan instrumen perdagangan dan pembiayaan yang dapat mendukung upaya stabilisasi harga pangan nasional, mendorong peningkatan daya saing perdagangan, dan perluasan akses peningkatan modal kerja bagi para petani, UKM, maupun pelaku usaha lainnya," tegas Karyanto.

Ditambahkan Karyanto Suprih, SRG di Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten ke 3 yang telah menerbitkan Resi Gudang, sebelumnya yakni Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang.

Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus



Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, memukul gong peresmian gudang SRG Desa Tekad, disaksikan Irjen Kemendag, Karyanto Suprih.

adalah gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran 2011. Gudang SRG di Tanggamus mendapatkan persetujuan sebagai Gudang SRG pada 30 Oktober 2014 dengan Pengelola Gudang PT. Bhanda Ghara Rekso (Persero), yang pengelolaannya berbentuk perjanjian kerja sama kelola dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Pada Mei 2015, Gudang SRG Kabupaten Tanggamus telah menerbitkan empat Resi Gudang untuk komoditas gabah dengan volume 42,9 ton atau senilai Rp 163,6 juta. Dari empat resi tersebut yang diagunkan sebanyak 3 Resi Gudang sebesar 34,8 ton atau senilai Rp 132,8 juta dengan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank BJB sebesar Rp 91,6 juta.

Dalam kesempatan itu, Karyanto juga mengharapkan Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pesisir Barat dapat segera menyusul implementasi SRG. Sehingga fasilitas yang telah dibangun bersama melalui DAK Kemendag Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2014 dapat dimanfaatkan para petani, Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi/UKM, maupun para pedagang, dan eksportir sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan perdagangan.

"Saya harapkan manfaat SRG dapat

segera dirasakan masyarakat kita, khususnya di Provinsi Lampung," ucap Karyanto Suprih.

Sementara itu Kepala Diskoperindag Tanggamus Rustam dalam laporannya mengatakan, SRG bertujuan membantu para petani dan pelaku usaha untuk mendapatkan harga jual lebih baik. "Caranya dengan menyimpan komoditi di gudang pada saat harga gabah atau padi anjlok. Di samping itu, kualitas dan kuantitasnya juga tetap terjaga, sebab dilakukan uji mutu oleh LPK yang terakreditasi."

"Yang terpenting lagi, para petani juga bisa mendapatkan pinjaman bank dengan menjaminkan sertifikat SRG," ujar Rustam.

Di saat yang sama, Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, mengapresiasi keberadaan gudang dengan SRG di Tanggamus. Dirinya berharap petani dapat memanfaatkan fasilitas ini, karena memiliki banyak keuntungan. "SRG ini bisa menahan agar harga berada pada tingkat wajar dan menjawab kendala penguatan harga hasil komoditi pertanian," katanya.

"Kapasitas penyimpanan gudang ini mencapai 1.800 ton dan dilengkapi satu unit mesin pengering. Saya rasa ini sangat membantu petani dan sertifikat resi juga bisa dijadikan angunan di bank," imbuh Bambang Kurniawan.



Kolaborasi antara Pasar Lelang dan Soropadan Agro Expo mendorong pemasaran komoditas pertanian Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menjadi pemandu lelang PLKA Jateng.

Gairah Pasar Lelang Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya guna mempromosikan potensi agribisnis didaerahnya. Salah satu contoh, yaitu secara konsisten mendorong pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang Komoditi Agro- PLKA dan Soropadan Agro Expo- SAE.

Dalam pelaksanaan PLKA, kegiatannya telah diselenggarakan beberapa kali di tahun ini. Di awal bulan Juni 2015 lalu, pelaksanaan PLKA telah berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 15 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan- Disperindag, Provinsi Jawa Tengah, Prijo Anggoro BR, dalam keterangannya mengatakan, pada penyelenggaraan PLKA tersebut ada sebanyak dua belas komoditas yang ditransaksikan. "Transaksi PLKA kali ini didominasi oleh komoditi beras yang mencapai Rp 5,8 miliar atau sekitar 38,58 % dari total transaksi," terang Prijo.

"Kami cukup mengapresiasi para

pelaku PLKA yang berhasil transaksikan komoditi beras sebesar Rp 5,8 miliar. Itu artinya mereka mengantisipasi lonjakan permintaan beras jelang bulan ramadhan dan hari raya idul fitri," terang Prijo Anggoro.

Kegiatan PLKA, lanjut Prijo Anggoro, dimaksudkan untuk membantu petani, Kelompok Tani- Poktan, Gabungan Kelompok Tani- Gapoktan, koperasi, pedagang pengepul, pedagang antardaerah, pemilik resi gudang, dan pengelola gudang Sistem Resi Gudang bertemu langsung dengan pembeli.

Selain itu, PLKA juga untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan memperpendek mata rantai perdagangan, sehingga harga yang diperoleh merupakan hasil yang maksimal.

"Melalui pasar lelang, petani produsen memiliki kepastian harga, transparasi informasi harga, dan jaminan kualitas komoditi bagi pembelinya," tutur Prijo Anggoro.

Prijo Anggoro juga menambahkan, usia PLKA Jateng sampai saat ini memasuki tahun ke 12. Dan, PLKA yang selama ini diselenggarakan Disperindag, Jawa Tengah, secara resmi diserahkan pengelolaan dan penyelenggarannya kepada Koperasi Pasar Lelang Agro Jateng, sejak November 2014 lalu. "Jadi PLKA Jateng itu sudah direvitalisasi tahun lalu tepatnya pada bulan November 2014," katanya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan PLKA Jateng pada Juni lalu dilaksanakan di Pusat Pelayanan Agribisnis Petani- PPAP, di Agro Center Soropadan, Kabupaten Temanggung. Kegiatan itu juga mendapat perhatian dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan politisi PDI Perjuangan itu didaulat menjadi Juru Lelang memandu pelaksanaan transaksi. Dalam pelaksanaan PLKA Jateng itu, diikuti para penjual dari berbagai daerah di wilayah Jateng. Sedangkan pembelinya berasal dari wilayah Yogyakarta, Jakarta, Surabaya serta Bandung.

SAE VII

Selain PLKA, di PPAP, Agro Center Soropadan, pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan SAE VII. Event ini digelar secara rutin dua tahun sekali sejak tahun 2003. Tujuannya, memasarkan produk agro di Jawa Tengah hingga ke pasar internasional.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, untuk menembus pasar internasional produk-produk yang dijual harus sudah tersertifikasi. "Karena itu sertifikasi menjadi penting sebagai sebuah jaminan kualitas."

Adapun tema SAE VII, yaitu "Peningkatan Kualitas Produk Pertanian dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan Pangan". Terkait itu, Ganjar Pranowo, mengatakan, istilah ketahanan pangan naik peringkat sedikit menjadi daulat pangan. "Sebab, tahan saja tidak cukup. Apabila kita lengah sedikit akan disalahgunakan dan dibanjiri barang

impor. Tapi tidak demikian dengan daulat pangan, kita sendiri yang menentukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pangan inilah yang didorong untuk menjadi kontribusi terhadap daulat pangan," tuturnya.

Ganjar juga berharap, kegiatan SAE VII dapat membuat semua *stakeholder* dapat menampilkan produk terbaiknya, dan bertemu antara para penjual dan pembeli serta terjadi transaksi.

Selain itu, diharapkan, PPAP, Agro Center Soropadan juga bisa menjadi semacam laboratorium, sehingga tidak hanya untuk ekspor, tetapi menjadi percontohan kualitas pertanian terbaik. "Kami harapkan, modernisasi pertanian dilakukan di sini, riset-riset dilakukan di sini dengan sebuah harapan ketika ada orang mau belajar datang ke sini. Ketika itu bisa dijadikan rujukan maka akan banyak orang belajar dari tempat ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara SAE VII, Sri Puryono, menuturkan, Jateng yang terletak di perlintasan arus perdagangan dari timur ke barat terus berusaha mengembangkan potensi agribisnis, melalui penggalangan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di bidang produksi, pemasaran, investasi, maupun teknologi.

"Kegiatan SAE akan meningkatkan akses pasar global melalui forum temu usaha antarpetani dan *buyer* lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, meningkatkan akses kemitraan dan akses petani terhadap informasi teknologi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani melalui kesejahteraan," ujarnya.

Sekedar informasi, pembukaan SAE VII dihadiri sejumlah Dubes atau Atase dari negara asing. Diantaranya dari Mongolia, Tiongkok, Kuba, Hongaria, Arab Saudi, Kazakstan, Libya, Yaman, Suriname, Inggris, Palestina, dan Finlandia.

Revitalisasi PLKA

Beberapa tahun terakhir, istilah revitalisasi PLKA telah digaungkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bukan tanpa sebab, program itu diluncurkan lantaran kinerja PLKA tampak semakin mengalami penurunan. Baik itu berdasarkan nilai dan volume transaksi, maupun frekuensi pelaksanaan lelang.

Revitalisasi, menurut Kepala Bappebti, Sutriono Edi, bertujuan untuk membentuk penyelenggara PLKA yang mandiri dan profesional. Artinya, tidak bergantung pada dana APBN atau APBD dan fokus pada mengembangkan pasar lelang. Revitalisasi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume transaksi PLKA.

Selama ini, pelaksanaan PLKA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) daerah setempat. Karena keterbatasan SDM dari Disperindag tersebut, membuat PLKA tidak dapat berjalan optimal. Dengan revitalisasi, maka penyelenggaraan PLKA akan diserahkan kepada pihak swasta yang profesional agar dapat lebih bermanfaat dan berfungsi maksimal.

Pada 2014 terdapat 13 penyelenggara PLKA yang dibiayai APBN dan APBD, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta. Selain itu terdapat 2



penyelenggaraan PLK oleh pihak swasta, yaitu PT. iPASAR Indonesia dan Pasar Fisik CPO Jakarta Futures Exchange (JFX).

Secara bertahap, usaha Bappebti untuk merevitalisasi deretan PLKA tersebut mulai terlihat. Hingga akhir tahun 2014, revitalisasi PLKA dilakukan di 5 daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Kelima daerah tersebut seluruhnya diberikan persetujuan sebagai penyelenggara PL kepada pihak swasta.

Lima penyelenggara PLKA yang telah diberikan persetujuan, yaitu Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat dan PT. Puspa Agro di Sidoarjo, dan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (Puskompas) Makassar.



Badan Narkotika Nasional (BNN) Kunjungi Bappebti

Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti didampingi Pejabat Eselon III dan IV Bappebti menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional (BNN), 16 Juni 2015. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka melakukan audiensi dan membangun jejaring kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kementerian/Lembaga Pemerintah.

"Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Indonesia Darurat Narkoba yang mengangkat tema 'Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045' yang dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh 827 orang Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan Kementerian/LPNK serta BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota," terang Sri Nastiti.

Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

Bappebti menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Ruang Rapat Lantai 5, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin-Selasa (15-16/06).

Pertemuan Teknis ini diselenggarakan dalam rangka diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PBK, terutama diseminasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan lima peraturan Kepala Bappebti yang baru diterbitkan. Peserta Pertemuan Teknis ini adalah Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka yang berkantor Pusat di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan Para Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada diskusi panel pertama, Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Hariyati menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Paket Kebijakan Bappebti dalam meningkatkan integritas perdagangan berjangka. Bertindak sebagai moderator, Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Himawan Purwadi.

Sementara itu, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu menyampaikan materi mengenai "Implementasi atas Paket Kebijakan Bappebti Dalam Meningkatkan Integritas Perdagangan Berjangka".



Rapat Pembangunan Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNA)

Kepala Biro Perniagaan Pantas Lumban Batu yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Sri Hariyati memimpin rapat mengenai pembangunan Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNA) oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) di Kantor Bappebti, Senin (4/5).

Rapat ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan SITNA sekaligus sinkronisasi dengan sistem pengawasan transaksi perdagangan berjangka yang telah diselenggarakan Bappebti. SITNA dibangun sejak tahun 2012 dan saat ini telah masuk tahap akhir penyelesaian pembangunan infrastruktur.

Ide utama dari SITNA adalah sebagai upaya dari KBI sebagai salah satu SRO untuk memberikan sistem perlindungan kepada

nasabah. Hal tersebut mengingat keterbatasan nasabah dalam mengakses data primer secara langsung ke *trading platform* guna memastikan bahwa amanatnya telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh pialang ke Lembaga Kliring Berjangka.

Dengan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para nasabah, khususnya dalam hal penyediaan media: 1) uji silang antara data yang diperoleh masyarakat dari perusahaan pialang dan yang ada di lembaga kliring; 2) memberikan kepastian bahwa amanat yang dikirimkan oleh nasabah ke pialang memang telah dilaksanakan dan 3) menciptakan kredibilitas lembaga sehingga mampu menumbuhkan keyakinan yang lebih besar bahwa transaksinya telah diregistrasikan, dilaksanakan dan dilaporkan.

Bappebti Selenggarakan Pelatihan Penyuluh Lapangan SRG

Sekretaris Bappebti Sri Nastiti yang mewakili Kepala Bappebti membuka dan memberikan pengarahan pada acara Pelatihan Penyuluh Lapangan SRG yang diselenggarakan pada tanggal 5 s/d 8 Mei 2015 di Gedung Bappebti Kemendag, Selasa (05/04).

Dalam sambutannya Sekretaris Bappebti menyampaikan, fokus dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan teknis pelaksanaan SRG kepada para tenaga/SDM dari dinas perdagangan dan penyuluh pertanian lapangan yang profesional sehingga dapat mendukung implementasi SRG di berbagai daerah.

Peserta yang hadir pada Pelatihan Penyuluh Lapangan SRG adalah perwakilan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan yang berasal dari 18 daerah yaitu : Kab Bondowoso, Kab Cilacap, Kab Katingan, Kab Simeulue, Kab Jayapura, Polewali Mandar, Kab Luwu Timur, Kab Tolitoli, Kab Konawe Selatan, Kab Wakatobi, Kota Palu, Kab Limapuluh Kota, Kab Tapin, Kab Purworejo, Kab Pemalang, Kota Palopo, Kab Pesisir Barat, Kab Lampung Timur.



JFX Bekukan 2 Izin Pialang



Terkait pembekuan dua anggota JFX itu, otoritas perdagangan berjangka- Bappebti juga membekukan PT Bimasakti Berjangka melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 07/Bappebti/Kep-Pembekuan/SA/05/2015. Sedangkan pembekuan izin usaha PT Reymount Futures, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 05/Bappebti/Kep-Pembekuan/SA/05/2015.

Keterangan yang dihimpun dari JFX, PT Reymount Futures diindikasikan melakukan 11 pelanggaran diantaranya pemegang saham yang fiktif dan perseroan tidak memenuhi ketentuan modal bersih disesuaikan- MBD.

Sementara itu, PT Bimasakti Berjangka diindikasikan melakukan 6 macam pelanggaran, diantaranya seperti terbukti melakukan pelanggaran terhadap rekening terpisah sampai diduga memalsukan bilyet deposito berjangka.

Dengan menyandang status izin dibekukan, PT Reymount Futures dan PT Bimasakti Berjangka tidak dapat menggunakan hak anggota bursa. Di samping itu, posisi terbuka nasabah dari kedua pialang berjangka itu dapat dialihkan kepada pialang berjangka lainnya yang bersedia.

Sementara itu, bila dalam proses pengalihan posisi nasabah yang terbuka tidak dapat dilaksanakan, maka JFX berkenan untuk melakukan likuidasi semua posisi terbuka tersebut.❧

Jakarta Futures Exchange- JFX membekukan keanggotaan perusahaan pialang berjangka PT Reymount Futures dan PT Bimasakti Berjangka sebab diindikasikan melakukan beragam pelanggaran.

Arah Kebijakan Bappebti 2015

Bappebti menetapkan tiga hal mendasar di bidang perdagangan berjangka komoditi yang akan menjadi arah kebijakan selama tahun 2015 ini. Tiga hal tersebut adalah, pertama, peningkatan transaksi multilateral. Kedua, peningkatan integritas industri perdagangan berjangka komoditi- PBK. Ketiga, pelayanan dan penegakan hukum.

"Selaku otoritas PBK, Bappebti mendorong bursa berjangka meningkatkan likuiditas transaksi dan kredibilitas bursa berjangka, menyelaraskan regulasi, menjamin kepastian hukum, serta adil dan transparan," kata Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Sutriono berkomitmen untuk mendorong kerja sama bursa berjangka dalam negeri dengan bursa berjangka luar negeri. Menurutnya, berbagai komoditas ekspor utama Indonesia yang diperdagangkan di bursa berjangka diharapkan menjadi referensi harga internasional.

"Pemerintah berharap, pelaku usaha PBK dapat menggiatkan transaksi multilateral, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan jaminan keamanan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi di industri PBK," katanya.

Lebih jauh dikatakan, menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan industri PBK, diantaranya peningkatan investor

di Indonesia, kemudahan arus perpindahan barang yang mendorong likuiditas transaksi multilateral, munculnya diversifikasi produk kontrak multilateral, dan peningkatan jumlah calon nasabah pialang berjangka dari luar maupun dalam negeri.

"Industri perdagangan berjangka di Indonesia masih sangat baru, banyak masyarakat yang belum kenal dengan potensi bisnis yang bisa diperoleh dari industri ini. Untuk itu, perlu sinergi antara Bappebti, self-regulatory organization (bursa berjangka dan kliring berjangka), serta pelaku usaha PBK lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," imbuh Sutriono Edi.❧

JFX Menggadang IGBF

Jakarta Futures Exchange- JFX mengambil langkah-langkah strategis pra peluncuran produk baru yang disebut Indonesia Government Bond Futures- IGBF. Salah satu strategi JFX perkenalkan IGBF yakni pelatihan wakil dari tiap perusahaan pialang berjangka dan pedagang anggota JFX. Selain untuk menunjang peluncuran produk, kegiatan ini juga sebagai bentuk pelayanan JFX kepada para anggota.

Plt. Direksi JFX, Adler Manurung, mengatakan, penting adanya pemahaman mengenai produk IGBF, sebelum nantinya dipasarkan pada masyarakat. "IGBF memiliki prospek yang cukup bagus, mengingat pemerintah terus meningkatkan penerbitan jumlah obligasi. Pada RAPBN 2015, dicantumkan bahwa obligasi pemerintah diterbitkan sebesar Rp 250 triliun, dan ini merupakan sumber transaksi."

"Selama ini para pelaku asing yang banyak memegang obligasi pemerintah, saat ini diperkirakan mencapai Rp 500



triliun. Sebab itu, para pelaku asing sudah banyak yang meminta agar di Indonesia ada produk bond futures," jelas Adler Manurung.

Menurut Adler Manurung, keuntungan yang diharapkan investor dari investasi dalam bentuk obligasi adalah peluang untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari deposito. Investor di Indonesia lebih menyukai obligasi pemerintah

dibandingkan dengan obligasi perusahaan swasta karena risikonya sangat kecil. Risiko yang dimaksud adalah risiko gagal bayar.

"Minat masyarakat terhadap obligasi inilah yang ditangkap JFX, dan dikembangkan menjadi produk futures. Sebab itu JFX berharap produk ini dapat menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk bertansaksi maupun berinvestasi melalui JFX," sebut Adler Manurung.❧

Permendag No. 33 Ciptakan Good Mining Practices

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam pernyataannya mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ekspor Timah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari pertambangan timah terhadap lingkungan, khususnya di wilayah pertambangan timah di Pulau Bangka.

"Permendag No. 44/M-Dag/Per/7/2014 tentang Ekspor Timah direvisi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam- *sustainable resouces* dan kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung terciptanya *good mining practices* melalui proses *Clear and Clean- Cnc*," ujar Rachmat Gobel, saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup- Walhi Indonesia, tercatat 65 % hutan dan lebih dari 70 % terumbu karang di Pulau Bangka telah rusak akibat dari perambangan timah liar. Selain itu 15 sungai pun telah tercemar oleh limbah penambangan timah, sehingga akses air bersih makin sulit

didapatkan oleh masyarakat di Pulau Bangka.

Sementara itu, 97 % limbah yang dihasilkan dari proses penolahan bijih timah yang mengandung logam berat dan dalam keadaan yang mengkhawatirkan, antara lain tembaga, timbal, merkuri, seng dan arsen. Logam berat tersebut jelas akan mencemari lingkungan untuk periode yang cukup lama.

Revisi Permendag tersebut akan dilakukan paling lambat 1 November 2015. Dibutuhkan waktu yang lumayan lama karena isu timah merupakan isu kolektif dari berbagai instansi. Kemendag mengambil inisiatif untuk menyelamatkan segala dampak buruk akibat penjarahan tambang timah dengan memperketat skema regulasi ekspor timur melalui bursa berjangka komoditi.

"Saatnya Kementerian Perdagangan peduli dengan melakukan tindakan nyata untuk menjaga kualitas hidup generasi penerus di masa yang akan datang," ujar Rachmat Gobel.❧




Ekspor Minyak Sawit Stagnan

Permintaan minyak sawit jelang bulan ramadhan tahun ini cukup mengecewakan. Permintaannya stagnan dan cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia- GAPKI, Fadhil Hasan, biasanya, mendekati bulan suci itu permintaan minyak sawit cenderung meningkat karena adanya peningkatan konsumsi khususnya dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Volume ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia pada Mei 2015 tercatat turun 1,7 % dibandingkan dari bulan sebelumnya atau dari 2,25 juta ton pada April lalu menjadi 2,22 juta ton. Meskipun ada penurunan ekspor minyak sawit pada Mei, secara year-on-year ekspor minyak sawit Indonesia tumbuh cukup baik, yaitu sekitar 26 % periode Januari-Mei 2015 dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau dari 8 juta ton Januari-Mei 2014 tumbuh menjadi 10,1 juta ton periode yang sama 2015.

Dari keterangan pers GAPKI, Juni 2015 lalu, juga mengatakan, penurunan permintaan dari pasar global akan minyak sawit ini disebabkan harga minyak kedelai yang turun karena melimpahnya stok di Amerika Selatan, Brazil dan Argentina.

Meski demikian, peningkatan permintaan minyak sawit juga datang dari Amerika Serikat sebesar 26 % dan Tiongkok 18 %. Penguatan kurs dolar Amerika Serikat adalah salah satu faktor pendukung naiknya volume ekspor ke negara Paman Sam ini.

Dari sisi harga, harga rata-rata CPO global pada Mei 2015 masih stagnan dan cenderung menurun dibandingkan bulan lalu. Harga rata-rata Mei hanya mampu bertengger di US\$ 653,2 per metrik ton dengan pergerakan harga harian di kisaran US\$ 642,50 – US\$ 665 per metrik ton. 

Targetkan RI Jadi Produsen Kakao Terbesar di Dunia

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan produktivitas kakao ditingkatkan tiga kali lipat, sehingga Indonesia bisa jadi penghasil kakao nomor satu di dunia. Guna memenuhi target produsen kakao terbesar di dunia, baru-baru ini Wapres JK mengumpulkan 11 gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kakao di Indonesia.

"Presiden dan Wapres targetkan tahun 2020 Indonesia akan jadi penghasil kakao nomor satu di dunia, melampaui Pantai Gading," kata Gubernur Sulawesi Barat Anwar, Adnan Saleh, di Kantor Wapres, Jakarta, baru-baru ini.


Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim menjelaskan di wilayahnya terdapat 153 ribu hektare yang dialokasikan untuk memproduksi kakao. Muslim melanjutkan

ANRPC Bertekad Atasi Rendahnya Harga Karet

Pertemuan Tingkat Menteri yang dihadiri delegasi sembilan negara anggota Asosiasi Negara Produsen Karet Alam (Association of Natural Rubber Producing Countries- ANRPC) bertekad kembali ke khitah, yang salah satunya memperjuangkan rendahnya harga karet alam internasional. Pertemuan ANRPC itu dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Mei 2015 lalu.


Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Deny W. Kurnia, yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan Executive Committee (Senior Officials Meeting) menegaskan, Pertemuan Tingkat Menteri kali ini membawa ANRPC kembali ke tujuan organisasi sesuai konstitusinya, yaitu sebagai forum koordinasi menyangkut produksi dan pemasaran, kerja sama teknis, dan stabilitas harga yang remuneratif bagi petani.

Saat ini, Thailand menduduki peringkat pertama sebagai negara produsen dengan produksi sejumlah 4,3 juta ton diikuti Indonesia dan Vietnam dengan produksi masing-masing 3,1 juta ton dan 954 ribu ton. Estimasi total produksi negara anggota ANRPC tahun 2015 adalah 11,37 juta ton atau memiliki pangsa produksi sebesar 89 % dari produksi global. Jumlah produksi global tahun 2015 diprediksi sejumlah 12,769 juta ton dan konsumsi global sebesar 12,758 juta ton. Surplus produksi karet alam di tahun 2015 dapat ditekan hanya sekitar 11 ribu ton.

Sebagai informasi, ANRPC merupakan asosiasi negara penghasil karet alam yang beranggotakan 11 negara yakni Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, India, Kamboja, Filipina, Papua Nugini, Sri Lanka, dan Singapura. Sekretariat ANRPC berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia dengan Sekretaris Jenderal yaitu Sheela Thomas dari India. Pertemuan Tingkat Menteri ANRPC terakhir kali diadakan tahun 2005. 

pihaknya akan mengembangkan lahan jadi 250 ribu hektare untuk memenuhi target Jokowi-JK.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menuturkan permintaan akan kakao meningkat hingga 10 %, sementara produksi kakao dalam negeri hanya mampu memenuhi tiga persen. "Kita harus meningkatkan produktivitas. Jadi per hektare saat ini baru di atas 500-800 kilo per tahun. Ini perlu kita tingkatkan," tuturnya.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, menambahkan ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan untuk mencapai target tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah bibit unggul, pupuk, dan penyuluhan. 

Warehouse receipt system as a synergy for National Food Development


Corn, rice and soya bean are strategic commodities that support national food self-sufficiency. To develop those products, we need a strategy and one of the strategy is to utilize warehouse receipt system (SRG) warehouse that some have been built by the government.

In regards to this, SRG stockholder has a session in a form of Focus Group Discussion (FGD) to synergize the development of agricultural commodities and Warehouse Receipt System (SRG). FDG that has been held on the 16th of December 2014 was attended by Directorate General of Crops, Coftra, UKM and Union Ministry and other related agencies.

Below is FDG conclusion for SRG development program in 2015; First, there was suggestion for holding integrated program of Agro Business development on SRG basic that will involve related sectors or stockholders.

Second, in regards to the integrated program, we need to do rapid appraisal on agricultural areas where SRG warehouse has been built. That Rapid Appraisal was intended to identify detailed problem on the field either on SRG's side or on agricultural business at related SRG area.

Third, it has been agreed three districts in Central Java provinces which are Grobogan, Blora and Kudus that will be the pilot model of integrated program of Agro Business on SRG basic.

Forth, farmers group & its combined group are possible to become the owner and/or the management of SRG. They should firstly establishing a business entity and also meet other requirements as per applicable provision. 

JFX recorded 22 % Multilateral transaction increase

Jakarta Future exchange – JFX recorded 22% multilateral transaction increase from 326,985 lot in 2013 became 400,000 lot at the end of 2014. The most traded product in 2014 was Coffee futures contract which was recorded for 169,644 lot until November 2014 or 47% from total multilateral transaction.

On the other hand, the Olein and cocoa commodity futures contract have recorded 12.80% and 11.20% from total multilateral transaction.

JFX president director, Sherman Rana Kreshan in one occasion at the end of December 2014 also has revealed that gold

Katingan Regency Manages Rattan WRS


Coftra chief, Sutriono Edi with Trading Minister experts on Empowering Business on Micro, Middle, small dan export promotion selling sector, Retno Pudji Budi Astuti became event speakers with theme of "The introduction of warehouse receipt system (SRG) on rattan commodity development process in Katingan regency," on Monday (19/01/2015) in Palangkaraya

This event was sponsored by Katingan regency local government and facilitated by IKEA and WWF- Indonesia of Central Kalimantan Program as the organization that implements Responsible forest Management and Non Timber Forest Product program in Indonesia.


On his presentation, Coftra chief has delivered that the success on SRG implementation on rattan product requires synergy and cooperation between ministries, institutes, academics and agencies and also related businesses.

The attendance of rattan SRG socialization were Katingan regency Industrial and Trading head of department, Company Director of Middle Kalimantan Jamkrida, Rattan farmers gathering association, Rattan entrepreneur association, Indonesian Rattan Foundation, academics, NGOs such as WWF, IKEA and USAID.

"This event is intended to synchronize the understanding and preparation of SRG implementation for rattan commodity at Katingan regency," Sutriono said.

And referring to the result of 2014 SRG working group meeting, Sutriono Edi added, the pilot project of rattan SRG will be done in parallel at the upstream side for farmers/collector of Katingan and Simeuleu. For the downstream side will be at Kab. Cirebon for rattan industry/producer. 

futures contract transaction has reached 104.419 lot or 29% from total transaction. "Gold futures contract on 100 gram size currently become the most desirable by businesses and investor. In November 2014, Gold transaction in 100 gram size has experienced significant increase to become 43.200 lot or 1515% increase from 17.237 lot on the same period last year."

"Gold scroll contract increase from 735 lot on November 2013 to become 3.354 lot in November 2014 or has growth 356%," Sherman Rana Kreshna concluded. 





Andi Irawan – 0816-10-xxxx

Beberapa waktu lalu, dalam sebuah Tabloid terbitan Ibukota, kami membaca tentang Binary Option. Bagaimanakah pengaturan mengenai hal tersebut?

Jawaban:

1. Terkait artikel yang memaparkan perdagangan Opsi secara online menggunakan satu platform trading dengan beberapa aset dasar instrumen (valuta asing, komoditas, indeks saham atau saham) yang bisa dipilih nasabah melalui website binary.com, dapat kami beritahukan bahwa website tersebut dimiliki oleh Pialang luar negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.
2. Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti; dapat diancam dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
3. Masyarakat kami himbau untuk lebih berhati-hati agar tidak timbul kerugian terhadap praktik-praktik Perdagangan Berjangka yang ilegal.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Abandon

The act of an option holder in electing not to exercise or offset an option.

2. Accumulate

Traders who ordinarily deal in more than one contract are said to accumulate contracts when they add to their original position by adding more of the same contract as favourable opportunities arise.

3. Actuals

Actual physical commodities or instruments as distinguished from futures or options contracts.

4. Allowances

The discounts (premiums) allowed for grades or locations of a commodity lower (higher) than the par (or basis) grade or location specified in the futures contract. See Differentials.

5. Annual report

The yearly report of a corporation's financial condition. It includes a balance sheet, income statement, and other descriptive information of interest to investors.

6. Anomaly

A departure from the accepted norm. Traders talk of anomalies in the yield curve when they mean imperfections in the shape of the curve. Pricing anomalies can emerge between markets or between securities when there is a departure from their normal prices.

7. Anticipatory hedge

A hedging strategy that involves taking a futures position in anticipation of a later cash transactions.

8. Approved Delivery Facility

Any bank, stockyard, mill, store, house, plant, elevator or other depository that is authorized by an exchange for the delivery of commodities tendered on futures contracts.

9. Arbing

The execution of a trade conducted from a trading desk to the trading pit by the use of hand signals as opposed to the traditional method of having a runner carry a copy or the order to the pit broker.

10. Arbitrage

Simultaneous purchase of cash commodities or futures in one market against the sale of cash commodities or futures in the same or a different market to profit from a discrepancy in prices. Also includes some aspects of hedging. See Spread, Switch.

NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG

BULAN OKTOBER 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Oktober 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Oktober 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Oktober 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	496.230.500	496.230.500	17.975.973.000
2.	Jambi	3.990.200.000	3.990.200.000	16.222.441.000
3.	Lampung	3.940.600.000	3.940.600.000	8.939.200.000
4.	Jawa Barat	6.897.000.000	6.897.000.000	61.550.855.000
5.	Jawa Tengah	3.432.500.000	3.432.500.000	93.409.115.000
6.	Yogyakarta	6.255.500.000	6.255.500.000	77.167.200.000
7.	Jawa Timur	20.785.000.000	20.785.000.000	167.217.650.000
8.	Bali	600.000.000	600.000.000	7.435.437.500
9.	NTB	1.483.400.000	1.483.400.000	29.557.825.000
10.	Sulawesi Utara	15.107.234.000	15.107.234.000	84.817.159.000
11.	Sulawesi Selatan	12.589.500.000	12.589.500.000	38.305.850.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.049.936.000	1.049.936.000	13.422.461.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	6.899.600.000
14.	DKI	Nihil	Nihil	7.418.500.000
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	Nihil	130.000.000
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL		76.627.100.500	90.215.997.000	630.469.266.500

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT

PERIODE SEPTEMBER 2014

Komoditas	Penawaran Oktober 2014	Transaksi Januari - Okt 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	522.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	84.000 Kg	0	0
Gondorukem	2.131 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

Sumber : PT iPASAR, data diolah



Sistem Resi Gudang Memperkuat Posisi Tawar Petani



Mr. B : SRG adalah kepanjangan dari Sistem Resi Gudang, yang artinya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Dan Resi Gudang adalah bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Tujuannya untuk mengamankan hasil panen petani supaya dapat disimpan di gudang, dan apabila harga bagus biasa dijual dengan harga yang tinggi.

Pebti : Lalu komoditi apa saja yang bisa dimasukan ke gudang ?

Mr. B: Saat ini, komoditi yang bisa dimasukan ke gudang SRG adalah komoditi Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput, Laut, Rotan dan Garam.

Pebti : Syaratnya untuk masuk ke gudang SRG apa saja Bi,,,???

Mr. B : Mudah kok,,, Seperti, hasil pertanian memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan. Sedangkan jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG tergantung dari jenis komoditi yang disimpan. Sebagai contoh, untuk jagung, biasa dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah sekitar 20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan.

Pebti : Lalu keuntungannya untuk petani seperti apa???

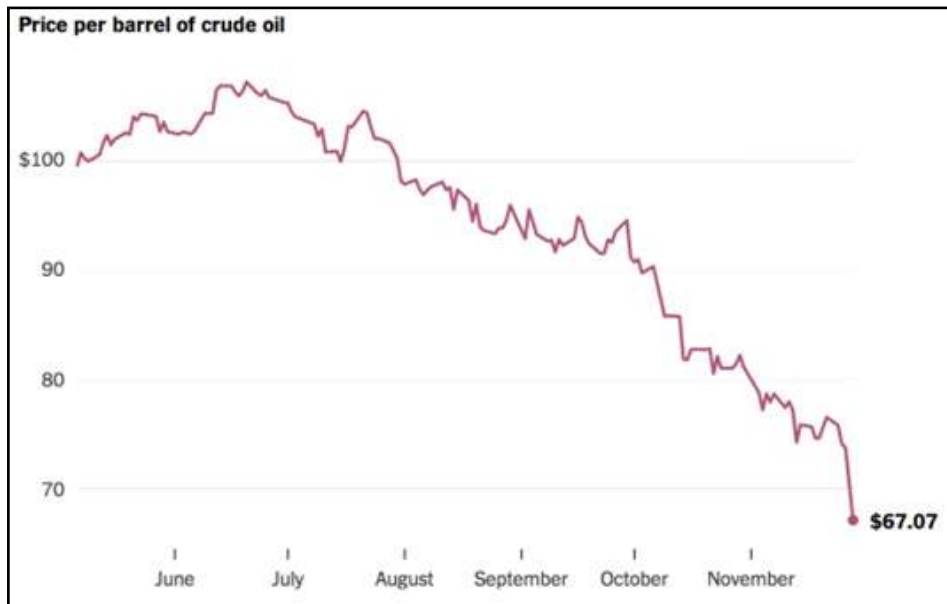
Mr. B : Dengan adanya SRG, akan terbuka peluang bagi petani untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya di mana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi. Selain itu, petani mendapatkan Kepastian mutu dan jumlah, karena tes uji dan mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi. Dengan memiliki Resi Gudang, petani dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan Resi Gudang. Di samping itu, mempermudah petani dalam jual-beli komoditi secara langsung maupun melalui pasar lelang karena tidak perlu membawa komodifnya sebagai contoh tetapi cukup membawa resi.



HEDGING BBM UNTUK STABILITAS HARGA NASIONAL

Kenaikan harga bahan bakar minyak- BBM yang cukup tinggi pertengahan tahun lalu membuat harga komoditi merangkak naik.

Namun harga komoditi sulit mengikuti turunnya harga BBM secara drastis di awal tahun ini. Setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi BBM dan menyerahkan harga pada BBM pada mekanisme pasar, harus dipikirkan cara tepat untuk mengelola stabilisasi harga.



Sumber: Chicago Merchantile Exchange (CME)

Volatilitas harga BBM dapat dilihat dari harga perdagangan crude oil di bursa CME yang sempat mencapai USD110 per barel dan turun menjadi USD 50,6 (enam) bulan kemudian.

Melihat fluktuasi harga BBM tersebut pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif. Tidak ada yang salah ketika pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi untuk mengurangi beban APBN. Namun penentuan harga BBM untuk masyarakat tidak serta merta harus diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencegah bobolnya APBN. Pemerintah juga perlu memikirkan alternatif untuk menjaga stabilitas harga BBM karena berdampak ke banyak sektor.

Stabilitas harga BBM tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pasokan dan persediaan, tetapi saat ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak di tingkat internasional. Untuk mendapatkan

kompensasi dari volatilitas harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar, pemerintah dapat melakukan *hedging*.

Hedging adalah cara pelaku pasar untuk mendapatkan kepastian harga bagi kebutuhan akan komoditi di masa yang akan datang. *Hedger* akan memperoleh selisih kenaikan harga di bursa berjangka untuk menutupi kenaikan biaya atas pembelian komoditi yang dilakukan *hedger* di pasar fisik. Demikian juga berlaku bagi *hedger* produsen jika harga pasar dari komoditi turun.

Dengan demikian hal ini akan membantu industri untuk membuat perencanaan kerja yang baik. Kepastian harga bagi industri nantinya dapat mendukung masuknya investor sehingga mampu menyediakan modal dan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk membangun negeri. Bagi pemerintah, stabilitas harga BBM sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga kebutuhan

pokok yang turut mendukung terciptanya stabilitas ekonomi bahkan stabilitas politik.

Pertanyaan berikutnya siapa yang melakukan *hedging* tersebut? Pemerintah, industri selaku *end customer*, atau Pertamina selaku entitas yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM ke seluruh lapisan masyarakat termasuk industri?

Melihat struktur pasar di Indonesia yang sebelumnya sudah terbiasa dengan pola subsidi, maka lebih tepat jika Pertamina yang berperan sebagai *hedger*. Biaya *hedging* ditanggung oleh Pertamina selaku badan usaha milik Negara- BUMN yang sebagian risiko bisnisnya ditanggung oleh pemerintah. Biaya *hedging* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai peran serta pemerintah untuk mendukung stabilitas harga.

Adapun biaya *hedging* berkisar 2 - 5 % dari nilai komoditi yang akan dilindungi nilainya di masa yang akan datang.

Untuk mengurangi biaya *hedging*, Pertamina (dalam hal ini pemerintah) cukup melakukan lindung nilai terhadap volume BBM yang tidak dapat disediakan Pertamina. Volume tersebut mengacu kepada besaran cadangan BBM yang wajib disediakan pemerintah, untuk 20 hari atau sampai dengan 60 hari. Semakin besar cadangan yang harus disediakan semakin baik untuk stabilisasi harga, namun semakin besar biaya *hedging* yang dibutuhkan.

Sarana untuk melakukan *hedging* saat ini belum tersedia di dalam negeri. *Hedging* dapat dilakukan di bursa berjangka luar negeri seperti Chicago Merchantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE), Euronext dan lainnya. *Hedger* juga bebas melakukan *hedging* di bursa mana saja tanpa terikat pada kontrak fisik yang sudah dibuat. Pada saat harga naik, *hedger* mengambil keuntungan dari selisih harga yang terjadi di bursa. Selisih harga yang diperoleh tersebut digunakan untuk menutupi biaya kenaikan harga yang terjadi di pasar fisik. Demikian pula sebaliknya.

Mekanisme hedging

Instrumen *hedging* saat ini bukan lagi merupakan instrumen yang tidak dapat digunakan oleh BUMN. *Hedging* malah dianjurkan penggunaannya di lingkungan BUMN sejak September 2013. Pengaturan tersebut ditegaskan melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bursa berjangka komoditi tidak hanya memberikan informasi harga komoditi untuk satu waktu tertentu saja, tetapi juga memberikan informasi untuk beberapa bulan bahkan tahun yang akan datang. Dengan demikian para pelaku di bursa berjangka akan memiliki beragam informasi untuk memprediksi harga sesuai kebutuhan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada *price quote* dari CME yang memperdagangkan beberapa jenis BBM.



Month	Options	Charts	Last	Change	Prior Settle	Open	High	Low	Volume	Hi / Low Limit	Updated
FEB 2015	OPT		47.28	+1.03	46.25	46.35	47.53	45.95	16,557	56.25 / 36.25	03:33:34 CT 16 Jan 2015
MAR 2015	OPT		47.77 b	+1.04	46.73	46.73	47.99	46.40	29,070	56.73 / 36.73	03:33:35 CT 16 Jan 2015
APR 2015	OPT		48.53 a	+1.06	47.47	47.52	48.72	47.17	3,449	57.47 / 37.47	03:33:28 CT 16 Jan 2015
MAY 2015	OPT		49.42 a	+1.12	48.30	48.12	49.54	47.99	1,294	58.30 / 38.30	03:33:01 CT 16 Jan 2015
JUN 2015	OPT		50.11 a	+1.01	49.10	49.13	50.31	48.78	2,041	59.10 / 39.10	03:33:34 CT 16 Jan 2015
JUL 2015	OPT		51.02	+1.17	49.85	49.83	51.02	49.59	538	59.85 / 39.85	03:32:14 CT 16 Jan 2015
AUG 2015	OPT		51.58 a	+1.01	50.57	50.30	51.68 b	50.25	131	60.57 / 40.57	03:33:31 CT 16 Jan 2015
SEP 2015	OPT		52.25 a	+0.96	51.29	51.60	52.39 b	51.42	261	61.29 / 41.29	03:33:28 CT 16 Jan 2015

Sumber: Chicago Merchantile Exchange

Manfaat hedging

Selain bermanfaat bagi kalangan industri, Informasi harga tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan. Dapat juga membantu pemerintah dalam merumuskan asumsi harga BBM dalam penyusunan APBN dan prediksi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi pemerintah.

Meskipun biaya *hedging* tidak dapat dikatakan kecil, namun hal ini dapat menjaga agar asumsi harga BBM tersebut dapat dipertahankan sehingga tidak mengganggu realisasi pembangunan nasional. Tidak masalah kalau biaya tersebut ditanggung oleh Pertamina, karena sampai saat ini 100% sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. Badan usaha milik negara sebaiknya tidak hanya fokus membukukan keuntungan untuk negara saja, tetapi juga harus didorong memberikan manfaat kepada masyarakat

luas. Manfaat tersebut dapat berupa dividen, stabilitas ekonomi dan politik, maupun pelayanan umum, dimana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu dengan pengelolaan harga BBM yang tepat tidak hanya akan mendukung terciptanya stabilitas harga kebutuhan pokok tetapi juga stabilitas nasional. Gunjang-ganjing harga BBM tidak lagi mempengaruhi situasi politik dalam negeri, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat lebih fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Tidak ada lagi kebingungan setiap kali terjadi fluktuasi harga BBM yang cukup signifikan. Sehingga istilah APBN buntung ketika BBM naik, namun menjadi defisit ketika harga naik tidak lagi menjadikan kita bangsa yang tidak berdaya di tengah ketidakpastian global. *)Widyaiswara Madya, Pusdiklat Kementerian Perdagangan.

Ernawan Sukardi

Step by Step

Bak judul lagu boy band dari negeri Paman Sam- New Kids on the Blok, Ernawan merasakan manis dan getirnya bisnis perdagangan berjangka yang dilakoni selama sekitar dua belas tahun belakangan.

Dalam kurun waktu itu, dia tetap kokoh di bawah bendera IBF. Merintis karir dari level marketing hingga sukses duduk di jajaran top manajemen IBF.

Loyal, disiplin, dan terus belajar itulah yang tergambar dari sosok Direktur Kepatuhan PT. International Business Futures- IBF, Ernawan Sukardi. Karirnya di industri Perdagangan Berjangka Komoditi- PBK dimulai sebelum berdirinya IBF pada tahun 2005.

"Awalnya saya masuk ke IBF memulai dari bawah, yakni sebagai marketing," kenang Ernawan, begitu dia di sapa, saat ditemui **Buletin Bappebti** di Kantor Pusat IBF, Paskal Hyper Square Blok D 45-46 Jl. H.O.S.Cokroaminoto No. 25-27, Bandung, baru-baru ini.

Ketekunan, kerja keras serta semangat belajarnya di bidang industri PBK, rupanya berbuah manis. Hal itu terbukti dengan karirnya yang terus merangkak naik. Pada tahun 2007, Pria kelahiran Yogyakarta, 1969 ini, menempati posisi sebagai *assistant manager marketing*. Setahun kemudian, dia pun diangkat menjadi

manager marketing.

Tak hanya sampai di situ, 29 Januari 2009, Bappebti mengeluarkan SK Nomor: 67/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang penugasan dirinya sebagai Direktur Kepatuhan. Lalu, Direktur Utama dan para pemegang saham IBF juga memberi dukungan dengan menunjuk Ernawan sebagai Direktur Kepatuhan.

"Awalnya saya ragu karena latar belakang saya Sarjana Ekonomi bukan Sarjana Hukum, tapi Pak Yustus sebagai Direktur Utama memotivasi dan mendukung saya. Katanya, biarpun SE tapikan sudah Wakil Pialang Berjangka (izin WPB tahun 2008). Selain itu beliau yakin, kalau saya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Kepatuhan," ujar Alumi Fak. Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP tahun 1994 ini.

Pertimbangan lain Direksi dan Komisaris IBF terhadap Ernawan dilihat dari pen-



galaman di lapangan. Sehingga diharapkan dirinya bisa menangani nasabah dan marketing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Setelah saya berfikir beberapa hari dan sholat istikharah meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, akhirnya dengan mengucapkan *Bismillah*, saya siap menerima amanah itu,” ujar suami Linda Windavanti ini.

Pria yang hobi jalan pagi bersama sang istri ini juga bersyukur, amanat tersebut hingga saat ini dapat dijalankan. "Alhamdulillah, dengan kemauan saya untuk belajar, saya dapat melaksanakan amanat itu sampai sekarang. Tanpa ada kemauan untuk belajar pasti akan sulit, sebab kedepannya akan bertambah lagi peraturan-peraturan yang tujuannya melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan PBK," sebut penggemar tokoh

fiksi film James Bond ini.

Yang menarik, selama mengeluti industri PBK, Ernawan tidak pernah berpindah-pindah ke perusahaan pialang lainnya. Loyalitasnya kepada IBF sangat tinggi dan mungkin saja sudah menjadi harga mati bagi dirinya. "Dulu, tawaran ke perusahaan lainnya sih banyak. Banyak teman-teman mengajak, ayo pindah kesana-kesini lebih enak. Tapi saya pikir-pikir lagi, kantor pialang lain yang ada di Bandung itu hanya kantor cabang. Sedangkan IBF merupakan satu-satunya perusahaan pialang berjangka yang berkantor pusat di Bandung. Jadi saya lebih milih IBF dong," ungkapnya.

Tak hanya itu, sejak awal, dia memiliki komitmen untuk dapat memajukan IBF. Terlebih lagi, dia bilang, suasana kerja yang berasas kekeluargaan di IBF sudah terjalin erat sejak lama. "Kami bukan sekedar bisnis saja, tapi nilai kekeluargaan di sini tidak akan ditemui di perusahaan

lain. Hubungan sesama karyawan sangat akrab, tapi untuk urusan pekerjaan kami tetap profesional," ujarnya.

Di sisi lain, secara finansial, dia mengaku sudah mendapatkan kenyamanan dengan penghasilan yang cukup memadai. "Alhamdulillah, apa yang sudah saya peroleh di saat ini sudah cukuplah," ujarnya sambil tersenyum.

Ernawan Sukardi selain dikenal sebagai pialang ulet, ternyata juga dikenal sebagai kolektor perangko lokal maupun internasional. Hebatnya, dia pernah mendapatkan piagam penghargaan tingkat nasional untuk lomba filateli.

"Intinya, saya bisa seperti sekarang ini berkat do'a dan restu orang tua, do'a istri-anak, do'a teman-teman baik di IBF, Bappebti, JFX, dan KBI. Terima kasih untuk semuanya," imbuh ayah dari Muhammad Reindra, ini.👉



Sistem Resi Gudang

**STABILITAS HARGA
&
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI**